



**LAPORAN KINERJA (LKj)
TAHUN 2023**

**KECAMATAN KALUMPANG
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kami kepada Allah SWT, karena hanya atas Rahmat dan Karunia-Nya kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja Kantor Kecamatan Kalumpang Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2023. Laporan ini disusun dalam rangka memenuhi ketentuan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Disamping itu, dalam meningkatkan kualitas pelayanan ini, dilakukan berbagai penyempurnaan terhadap sumber daya manusia yang ada serta sistem ketataleksanaan yang berlaku yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Materi Laporan antara lain menguraikan tentang capaian Indikator Kinerja Utama yang telah dicapai oleh Kantor Kecamatan Kalumpang Kabupaten Hulu Sungai Selatan, juga termuat isu strategis yang dihadapi berikut tindak lanjut yang dilakukan oleh Kantor Kecamatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Akhir kata, kami berharap agar Laporan Akuntabilitas Kinerja ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja bagi seluruh perangkat organisasi Kantor Kecamatan Kalumpang Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Kalumpang, 31 Desember 2023

Pit. CAMAT KALUMPANG



WAHYUDI NOOR, S.STP
Penata

NIP. 19900107 201206 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI.....	II
DAFTAR TABEL.....	III
DAFTAR GAMBAR	IV
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. TUGAS DAN FUNGSI SKPD	2
C. STRUKTUR ORGANISASI	3
D. PERAN STRATEGIS ORGANISASI.....	4
E. ISU STRATEGIS	5
F. SISTEMATIKA PELAPORAN.....	5
BAB II	7
PERENCANAAN KINERJA	7
A. RENCANA STRATEGIS	7
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA	8
C. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2023.....	10
D. PERJANJIAN KINERJA	12
E. PENGUKURAN KINERJA	14
BAB III	16
AKUNTABILITAS KINERJA.....	16
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	17
B. REALISASI ANGGARAN	16
C. PRESTASI YANG DICAPAI	18
BAB IV	18
PENUTUP.....	39

DAFTAR TABEL

TABEL 2.1 Target RPJMD Kecamatan Kalumpung.....	11
TABEL 2.2 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kalumpung	12
TABEL 2.3 Rencana Kerja Kecamatan Kalumpung Tahun 2023.....	12
TABEL 2.4 Anggaran Kecamatan Kalumpung Tahun 2023	14
TABEL 2.5 Perjanjian Kinerja Kecamatan Kalumpung Tahun 2023	16
TABEL 2.6 Formulasi/Pengukuran Capaian Kinerja Kecamatan Kalumpung Tahun 2023	17
TABEL 3.1 Capaian Kinerja Tahun 2023 Kecamatan Kalumpung	21
TABEL 3.2 Capaian Kinerja Tahun 2023 Kecamatan Kalumpung	29
TABEL 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja Kecamatan Kalumpung Tahun 2022 Dan Tahun 2023	31
TABEL 3.4 Perbandingan Target Akhir Renstra Tahun 2023 dan Capaian Kinerja Kecamatan Kalumpung Tahun 2022	32
TABEL 3.5 Program Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian.....	45
TABEL 3.6 Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencaaian	46
TABEL 3.7 Realisasi Anggaran Tahun 2023.....	45

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 3.1	18
CAPAIAN INDIKATOR DESA MAJU	18
GAMBAR 3.2	4
CAPAIAN PERSENTASE BUMDES YANG BEROPERASI DENGAN BAIK.....	4
GAMBAR 3.3	3
CAPAIAN INDIKATOR INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	3

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja (LKj) SKPD dibuat sebagai implementasi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, mengarahkan bahwa pelaksanaan pemerintahan harus berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab. Dalam laporan kinerja disajikan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka mencapai Indikator Kinerja Utama SKPD yang ditetapkan dalam Renja-SKPD.

Laporan kinerja merupakan media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja Kantor Kecamatan Kalumpang Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang berfungsi sebagai alat untuk mendorong instansi pemerintah dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan secara baik dan benar (Good Government) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan program secara transparan serta dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam salah satu pasal dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kantor Kecamatan Kalumpang Kabupaten Hulu Sungai Selatan menyusun laporan kinerja sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

Kinerja Kantor Kecamatan Kalumpang Kabupaten Hulu Sungai Selatan erat kaitannya dengan Tupoksi yang dimiliki. Tupoksi ini sesuai dengan Peraturan Bupati

Hulu Sungai Selatan Nomor 78 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kantor Kecamatan adalah perangkat Daerah Kabupaten yang mempunyai wilayah kerja tertentu yang dipimpin oleh Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dan melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan Daerah.

B. Tugas dan Fungsi SKPD

Kecamatan Kalumpang berfungsi sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Hulu Sungai Selatan yang dijabarkan ke dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Kantor Kecamatan Kalumpang mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menetapkan rencana strategis, program dan rencana kerja Kecamatan;
2. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
3. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
4. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
5. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
6. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
7. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
8. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa;
9. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan; dan
10. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.

C. Struktur Organisasi

Kecamatan Kalumpang merupakan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengan demikian untuk melaksanakan Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kalumpang maka dijabarkan dalam bagan struktur organisasi sebagai berikut:

1. Camat



Camat memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja kecamatan, dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh Pelimpahan Kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas Pemerintahan.

2. Sekretaris Kecamatan

Tugas pokok Sekretariat adalah melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan pelayanan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kecamatan, serta tugas lain yang diberikan Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan surat menyurat, kearsipan, investarisasi barang, rumah tangga, perlengkapan, perjalanan dinas kerjasama, hukum, hubungan masyarakat, keprotokolan, arsip dan dokumentasi serta pengelolaan administrasi kepegawaian dan ketatalaksanaan.

b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan penyusunan program, rencana kerja, rencana anggaran dan pelaporan pelaksanaan kegiatan, pengelolaan administrasi keuangan dan pertanggungjawaban keuangan serta laporan keuangan.

3. Seksi Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan pertanahan.

4. Seksi Ketertiban Umum

Seksi Ketertiban Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan serta urusan ketertiban umum.

5. Seksi Ekonomi dan Pembangunan

Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan produksi dan distribusi pelestarian lingkungan hidup dan swadaya masyarakat.

6. Seksi Pelayanan Umum

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pelayanan umum.

7. Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pendidikan, kesehatan masyarakat, generasi muda, dan pemberdayaan perempuan dan olah raga.

D. Peran Strategis Organisasi

Sebagai pelaksana perangkat daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Camat Kalumpang melaksanakan sebagian kewenangan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang dilimpahkan dan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan umum, Camat Kalumpang secara berjenjang melaksanakan tugas Pemerintah Kabupaten di wilayah Kecamatan Kalumpang. Dengan kedudukannya tersebut, Kecamatan Kalumpang mempunyai peran yang sangat strategis di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, baik dari tugas dan fungsi, organisasi, sumber daya manusia, dan sumber pembiayaannya. Penyelenggaraan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Selatan kepada Camat Kalumpang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara universal.

E. Isu Strategis

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau tantangan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kantor Kecamatan Kalumpang selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan sebagai subsistem dari system pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kabupaten, Propinsi dan Nasional terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak.

Dalam upaya mewujudkan akuntabilitas instansi pemerintah, pada Kantor Kecamatan Kalumpang juga tentunya ditemukan permasalahan. Adapun permasalahan yang dihadapi Kantor Kecamatan Kalumpang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya yaitu:

1. Peningkatan Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan

F. Sistematika Pelaporan

Laporan Kinerja Kecamatan Kalumpang Kabupaten Hulu Sungai Selatan disusun dengan sistematika pelaporan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini disampaikan tentang latar belakang disusunnya Laporan Kinerja (LKj), penjelasan tentang tugas dan fungsi SKPD, struktur organisasi, perang strategis organisasi, isu strategis dan sistematika pelaporannya.

BAB II Perencanaan Kinerja

Bagian ini menyampaikan rencana strategis, indikator kinerja utama, rencana kerja dan anggaran tahun 2023, perjanjian kinerja dan pengukuran kinerja.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Pada bagian ini dikemukakan tentang capaian kinerja Kecamatan Kalumpang dan realisasi anggaran Kecamatan Kalumpang di akhir tahun 2023.

BAB IV Penutup

Pada bagian ini dikemukakan tentang kesimpulan dari keseluruhan Laporan Kinerja (LKj) tahun 2023 ini.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Perencanaan Strategis Kantor Kecamatan Kalumpang Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran daripada Visi dan Misi Kantor Kecamatan Kalumpang Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Rencana Strategis Kantor Kecamatan Kalumpang Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dari tahun 2018-2023 Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Bupati Hulu Sungai Selatan terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah akan menjadi akuntabel. Rencana Strategis Kantor Kecamatan Kalumpang Kabupaten Hulu Sungai Selatan tersebut disusun untuk mewujudkan Visi dan Misi Kantor Kecamatan Kalumpang Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2018-2023 sebagaimana yang telah ditetapkan. Disamping itu pula Rencana Strategis Kantor Kecamatan Kalumpang Kabupaten Hulu Sungai Selatan diharapkan dapat mewujudkan sinkronisasi dengan rencana strategis Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Penyusunan Rencana Strategis Kantor Kecamatan Kalumpang Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023, sehingga Rencana Strategis Kantor Kecamatan Kalumpang Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan hasil rumusan bersama seluruh komponen Kantor Kecamatan Kalumpang Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Selanjutnya, Rencana Strategis Kantor Kecamatan Kalumpang Kabupaten Hulu Sungai Selatan tersebut akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Kantor Kecamatan Kalumpang Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam rencana kerja Kantor Kecamatan Kalumpang Kabupaten Hulu Sungai Selatan dimuat program dan kegiatan yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang. Perencanaan strategik merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang disusun untuk diimplementasikan dengan suatu strategi dan kebijakan yang digunakan dalam rangka pencapaian tujuan. Dengan perencanaan strategik, Kantor Kecamatan Kalumpang Kabupaten Hulu Sungai Selatan diharapkan dapat membangun strategi sebagai bagian penting organisasi yang berorientasi pada hasil yang diinginkan di masa mendatang. Dengan penetapan visi, misi dan strategi yang jelas dan tepat, maka Kantor Kecamatan Kalumpang Kabupaten Hulu Sungai

Selatan diharapkan akan dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi. Berkaitan dengan hal tersebut berikut ini akan diuraikan tentang visi, misi dan faktor-faktor kunci keberhasilan.

1. Visi

Visi kantor Kecamatan Kalumpang: **“Menuju Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang Cerdas, Inovatif, Teknologis dan Agamis untuk Mewujudkan Kesejahteraan Dunia dan Akhirat”**

2. Misi

Sebagai salah satu perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan kedudukan susunan Organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja Kecamatan Kalumpang mempunyai kewajiban mewujudkan Misi 5 yaitu :
”Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik berkualitas berbasis teknologi informasi dalam bingkai kehidupan yang agamis”

3. Tujuan

Adapun tujuan pembangunan Kecamatan Kalumpang adalah: **”Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih serta Layanan Publik yang Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi”**

4. Sasaran

Adapun sasaran jangka menengah Kecamatan Kalumpang sebagai penopang tujuan tersebut adalah:

1. **Meningkatnya nilai hasil evaluasi AKIP**
2. **Meningkatnya desa dengan status maju**
3. **Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan**
4. **Meningkatnya BUMDes yang beroperasi dengan baik**

B. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari satu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja,

permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Sebelum kami sampaikan Capaian IKU Kecamatan Kalumpang, perlu kami sampaikan Capaian Target RPJMD Kecamatan Kalumpang sebagai berikut:

Tabel 2.1
Target RPJMD Kecamatan Kalumpang

Visi RPJMD		Menuju Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang Cerdas, Inovatif, Teknologis dan Agamis untuk Mewujudkan Kesejahteraan Dunia dan Akhirat								
Misi 5 RPJMD		Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik berkualitas berbasis teknologi informasi dalam bingkai kehidupan yang agamis								
NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-					KONDISI KINERJA AKHIR
					2019	2020	2023	2023	2023	
	Tujuan PD	Sasaran PD								
1	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi	Meningkatnya desa dengan status maju	Rasio Desa Maju Terhadap jumlah desa yang ada di kecamatan	Desa	-	-	1:9	1:9	2:9	2:9
		Meningkatnya BUMDes yang beroperasi dengan baik	Persentase Bumdes yang beroperasi dengan baik	Persen	-	-	100	100	100	100
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	82	82	83	83	84	84

Adapun penetapan target IKU Kantor Kecamatan Kalumpang tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2.
Indikator Kinerja Utama Kantor Kecamatan Kalumpang

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Ket.
1.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas	1. Meningkatkan desa dengan status maju	1. Rasio Desa Maju Terhadap jumlah desa yang ada di kecamatan	IKU

	berbasis teknologi informasi			
		2. Meningkatnya BUMDes yang beroperasi dengan baik	2. Persentase Bumdes yang beroperasi dengan baik	IKU
		3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan	3. Indeks Kepuasan Masyarakat	IKU

C. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2023

Adapun rencana kerja Kecamatan Kalumpang pada Tahun 2023 dapat dirincikan sebagaimana Tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3

Rencana Kerja Kecamatan Kalumpang Tahun 2023

Sasaran Program	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Terselenggaranya Pemerintahan Desa yang dilaksanakan dengan baik	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	8.062.300
			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	11.700.000
			Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	5.500.000
			Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	3.200.000
Terselenggaranya Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan dengan baik	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	17.562.400
			Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	47.359.450
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	32.888.000
Terselenggaranya urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dengan baik	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	46.150.000
			Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4.000.000

Sasaran Program	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pengelolaan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan secara tepat dan akuntabel	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	69.800.000
Terselenggaranya Pelayanan Publik di Kecamatan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	14.584.750
Terlaksananya Kegiatan Perencanaan dan Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.500.100
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40.054.550
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	88.075.000
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.351.500
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.500.000
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	195.000.000
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	51.775.105
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	85.482.000
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.000.000			
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	11.575.000			

Sasaran Program	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	59.901.293
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.000.000
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.500.000
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.489.659.095
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.000.000
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.500.000
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.500.000
Total				3.397.085.593

D. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja pegawai aparatur sipil negara (ASN) dalam suatu organisasi pemerintahan bukan hanya bersifat administratif, tetapi diharapkan dapat mengarah pada manajerial yang memiliki efek ke bawah dan ke samping dalam organisasi tersebut. Dengan begitu, penandatanganan perjanjian kinerja dapat mendorong perbaikan struktur organisasi yang kurang rapi dan meminimalisir intervensi-intervensi dari pihak yang tidak bertanggungjawab.

Penyusunan Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Intsansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Menurut petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review instansi pemerintah yang termuat dalam PERMENPAN No. 53 Tahun 2014, Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati/Walikota sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya

terwujud akibat kegiatan tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Adapun Tujuan dibuatnya Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai wujud nyata komitmen antara Bupati dan Kepala SKPD untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
- b. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi (reward and punishment);
- d. Sebagai dasar bagi Bupati untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja pimpinan SKPD;
- e. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja yang dilakukan antara Bupati Hulu Sungai Selatan dan Kantor Kecamatan Kalumpang Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.5
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
CAMAT KALUMPANG
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2023

No.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya desa dengan status maju	Rasio Desa Maju terhadap jumlah desa yang ada di kecamatan	2 : 9
2.	Meningkatnya BUMDes yang beroperasi dengan baik	Persentase BUMDes yang beroperasi dengan baik	100 %
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	84

No.	Program	Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp. 3.136.278.643
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 14.584.750
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 97.809.900
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 69.800.000

- | | | | |
|----|--|-----|------------|
| 5. | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Rp. | 50.150.000 |
| 6. | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Rp. | 28.462.300 |

Kalumpang, 02 Oktober 2023

Pihak Kedua,
Bupati Hulu Sungai Selatan,

Drs. H. ACHMAD FIKRY, M.AP

Pihak Pertama,
Plt. Camat Kalumpang
Kabupaten Hulu Sungai Selatan

WAHYUDI NOOR, S.STP

Penata
NIP. 19900107 201206 1 001

E. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi Kantor Kecamatan Kalumpang Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100%. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Adapun untuk pengukuran kinerja disajikan sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 2.6
Formulasi Pengukuran Indikator Kinerja Utama Tahun 2023
Kantor Kecamatan Kalumpang

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan / Formulasi	Sumber Data	
1	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi	1	Rasio Desa Maju Terhadap jumlah desa yang ada di kecamatan	Jumlah Perbandingan Antara Desa Maju terhadap Jumlah desa yang ada di Kecamatan	Laporan
		2	Persentase BUMDes yang beroperasi dengan baik	$\frac{\text{Jumlah BUMDes yang beroperasi dengan baik}}{\text{Jumlah BUMDes}} \times 100$	Laporan
		3	Indeks Kepuasan Masyarakat	$\frac{\text{Total dari Nilai Persepsi per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$	Laporan Hasil Survey

Untuk menilai kinerja kecamatan digunakan kategori penilaian sesuai dengan Permendagri Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Adapun tabel pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian	Kode
1.	91% ≤ 100 %	Sangat Tinggi	Hijau Tua
2.	76 % ≤ 90 %	Tinggi	Hijau Muda
3.	66 % ≤ 75 %	Sedang	Kuning Tua
4.	51 ≤ 65 %	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50 %	Sangat Rendah	Merah

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran Kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi. Secara umum Kecamatan Kalumpang Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai salah satu Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang kegiatannya bersifat administratif secara profesional telah berjalan dengan baik. Pengukuran kinerja kali ini difokuskan pada pengukuran output dan outcome, sedangkan indikator benefit dan impact akan diukur sebatas apabila memungkinkan tersedia sumber datanya. Pengukuran kinerja dimaksudkan sebagai alat untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran dilakukan secara sistematis berdasar indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Pengumpulan data kinerja diperoleh dengan menggunakan formula capaian Indikator Kinerja Utama. Kualitas Indikator Utama harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

1. IKU dapat diukur secara objektif;
2. IKU menggambarkan hasil;
3. IKU relevan dengan kondisi yang akan diukur;
4. IKU cukup untuk mengukur kinerja.

Analisis tentang capaian kinerja secara keseluruhan dimaksudkan sebagai bahan laporan tentang keberhasilan ataupun kegagalan kepada atasan dan pihak-pihak yang berkepentingan. Analisis meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran dan tujuan organisasi. Analisis juga menjelaskan tentang perkembangan pencapaian sasaran dan tujuan secara efektif dan efisien sesuai dengan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Selanjutnya dilakukan evaluasi untuk mengetahui ketepatan dan efektifitas kebijakan maupaun proses pencapaiannya. Pengukuran capaian kinerja

adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi Pemerintah. Untuk ini Kecamatan Kalumpang mendukung misi ke 5 (lima) yakni : “Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik berkualitas berbasis teknologi informasi dalam bingkai kehidupan yang agamis”.

Pelaporan disusun dengan melakukan pendekatan terhadap indikator kinerja baik secara kualitatif maupun kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran tingkat pencapaian kinerja Kecamatan Kalumpang dilakukan dengan cara membandingkan antara target capaian, sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Kecamatan Kalumpang tahun 2023 dengan realisasinya, sedangkan untuk melaksanakan evaluasi capaian kinerja Kecamatan Kalumpang dilakukan penilaian dengan skala ordinal sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian	Kode
1.	91% ≤ 100 %	Sangat Tinggi	Hijau Tua
2.	76 % ≤ 90 %	Tinggi	Hijau Muda
3.	66 % ≤ 75 %	Sedang	Kuning Tua
4.	51 ≤ 65 %	Rendah	Kuning Muda
4.	≤ 50 %	Sangat Rendah	Merah

Pada bab ini juga akan disajikan akuntabilitas keuangan yang memuat realisasi anggaran sampai dengan akhir Tahun 2023 sesuai dengan pencapaian target kinerja dalam perjanjian kinerja.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas Laporan Kinerja kantor Kecamatan Kalumpang kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja 12 (dua belas) bulan yang memuat realisasi kinerja yang diperjanjikan selama tahun anggaran 2023. Dalam bab ini juga akan disajikan akuntabilitas keuangan yang memuat realisasi keuangan Tahun Anggaran 2023.

Tabel 3.2
Capaian atas indikator kinerja utama (IKU) Kecamatan
Kalumpang Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET 2023	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1	Meningkatnya desa dengan kualitas maju	Rasio Desa Maju Terhadap Jumlah Desayang ada di Kecamatan	Desa	2:9	7:9	350%
2	Meningkatnya BUMDes yang beroperasi dengan baik	Persentase BUMDes yang Beroperasi dengan Baik	Persen	100%	100%	100%
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	84	88,72	105,62%

1. Capaian Indikator Kinerja Utama

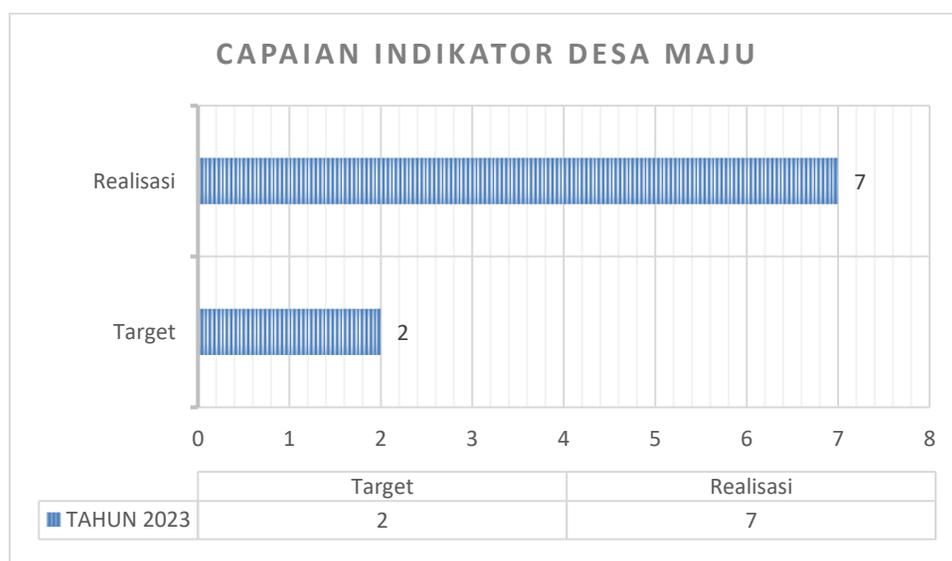
Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kantor Kecamatan Kalumpang. Pencapaian Indikator Kinerja Utama terdapat pada Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran seperti pada data-data berikut :

a) Capaian Indikator Rasio Desa Maju Terhadap jumlah desa yang ada di kecamatan

Capaian Indikator Rasio Desa Maju Terhadap jumlah desa yang ada di Kecamatan Kalumpang pada Tahun 2023 target yang ditetapkan adalah sebesar 2:9 Capaian Indikator Rasio Desa Maju dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini :

Gambar 3.1

Capaian Indikator Desa Maju



Dari data diatas dapat dilihat bahwa Desa maju yang ada di kecamatan Kalumpang berjumlah 7 (tujuh) desa dari 9 (sembilan) desa yang ada di Kecamatan Kalumpang. Sehingga capaian kinerja dapat dikatakan tercapai 350% atau melebihi target yang telah ditetapkan.

Sumber data capaian pada indikator ini diambil dari website Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (<https://idm.kemendesa.go.id/admin/content/?y=2023>)

Untuk Indikator Rasio Desa Maju Terhadap jumlah desa yang ada di Kecamatan didukung dengan program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan jumlah anggaran Rp. 25.262.300,00 dan realisasi sebesar Rp. 25.169.650,00 atau 99,63%

Tabel 3.4
Perbandingan Capaian Kinerja Kecamatan Kalumpang Tahun 2022 dan Tahun 2023

Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2022							Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2023						
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan	No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	Meningkatkan Desa Dengan Kualitas Maju	Rasio Desa Maju Terhadap Jumlah Desa yang ada di Kecamatan	1:9	1:9	100%		1	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi Kecamatan	Rasio Desa Maju Terhadap Jumlah Desa yang ada di Kecamatan	2:9	7:9	350%	Capaian sdh tercapai bahkan melebihi target yang di tentukan

Dari Tabel di atas di jelaskan Perbandingan Capaian Kinerja Kecamatan Kalumpang Tahun 2022 dan Tahun 2023, Pada Sasaran Indikator Desa Dengan Kualitas Maju dengan Indikator Kinerja 1 Yaitu Rasio Desa Maju Terhadap Jumlah Desa yang ada di Kecamatan, pada Tahun 2023 pelaksanaan penilaian Rasio Desa Maju Terhadap Jumlah Desa yang ada di Kecamatan sudah tercapai dengan 7 Desa yang berpredikat Maju dan 2 Desa dengan Predikat Mandiri.

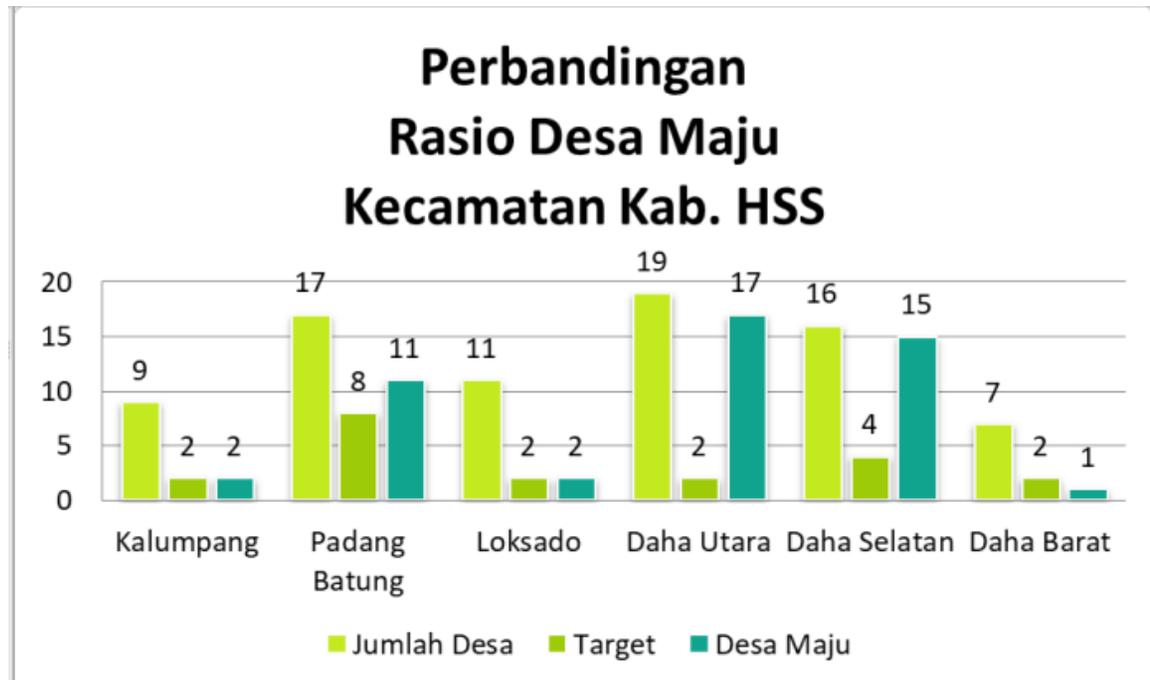
Alasan pemilihan indikator ini adalah untuk lebih meningkatkan kinerja kecamatan dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pembangunan di desa.

Tabel 3.5
Perbandingan Target Akhir Renstra Tahun 2023 dan Capaian Kinerja Kecamatan Kalumpang Tahun 2023

Realisasi Capaian Kinerja Target Akhir Renstra Tahun 2023							Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2023						
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan	No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	Meningkatkan Desa Dengan Kualitas Maju	Rasio Desa Maju Terhadap Jumlah Desa yang ada di Kecamatan	2:9	7:9	350%	Capaian sdh tercapai bahkan melebihi target yang di tentukan	1	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi Kecamatan	Rasio Desa Maju Terhadap Jumlah Desa yang ada di Kecamatan	2:9	7:9	350%	Capaian sdh tercapai bahkan melebihi target yang di tentukan

Dari Tabel di atas di jelaskan Perbandingan Target Akhir Renstra Tahun 2023 dan Capaian Kinerja Kecamatan Kalumpang Tahun 2023 Pada Sasaran Indikator Desa Dengan Kualitas Maju dengan Indikator Kinerja 1 Yaitu Rasio Desa Maju Terhadap Jumlah Desa yang ada di Kecamatan, yaitu target akhir Resntra sudah tercapai untuk indikator ini.

Perbandingan Indikator Rasio Desa Maju Terhadap Jumlah Desa Yang Ada di Kecamatan yaitu Perbandingan antara Kecamatan Kalumpang, Kecamatan Kalumpang, Padang Batung, Loksado, Daha Selatan dan Daha Barat dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Gambar 3.4

Sedangkan Perbandingan Capaian Kinerja Kecamatan Kalumpang Tahun 2023 dan Standar Nasional Belum ada data pembandingan yang relevan dan spesifik untuk dapat digunakan baik di tingkat daerah lain, provinsi maupun tingkat nasional.

Program yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian, Adapun capaian masing-masing program adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6
Program Yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian

No	Program	Target Kinerja Program/kegiatan/sub kegiatan (Th 2023)	Realisasi Kinerja Program/kegiatan/sub kegiatan (Th 2023)	Capaian
1	2	3	5	6
1.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	100%
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	100%	100%

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa untuk program-program yang direncanakan sudah bisa dilaksanakan dengan baik dan dapat menunjang keberhasilan pencapaian kinerja.

Tabel 3.7
Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian

Kegiatan	Sub Kegiatan	Target Kinerja Program/kegiatan/sub kegiatan (tahun)	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Persentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan dengan baik	100%	100%	100%
	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Persentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan dengan baik	100%	100%	100%
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Tugas Kesejahteraan Sosial dilaksanakan dengan baik	100%	100%	100%
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Tugas Kesejahteraan Sosial dilaksanakan dengan baik	100%	100%	100%

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa untuk kegiatan-kegiatan yang direncanakan sudah bisa dilaksanakan dengan baik dan dapat menunjang keberhasilan pencapaian kinerja.

Keberhasilan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor baik internal maupun eksternal yaitu:

- 1) Ketepatan pelaksanaan kegiatan yang mengacu kepada dokumen perencanaan.
- 2) Terdapat konsistensi dalam implementasi program kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
- 3) Adanya komitmen yang kuat dari pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan di dalam merealisasikan setiap tahapan pelaksanaan DPA Tahun Anggaran 2023.

Dari faktor pendorong keberhasilan pencapaian kinerja organisasi Kecamatan Kalumpang di harapkan pencapaian target Indikator akan tercapai sesuai rencana.

**Kegiatan yang Mendukung Tercapainya
Indikator Rasio Desa Maju Terhadap Desa Berkembang**

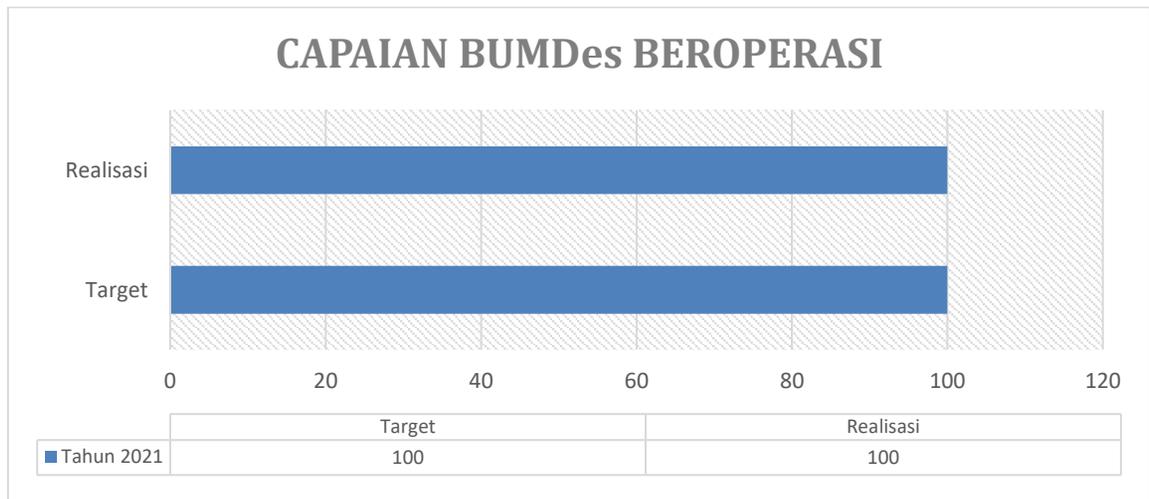
<p>Foto Pembinaan Pengelolaan Keuangan /APBDes</p>		<p>Rakor Bulanan sekaligus pembinaan dari TP PKK Kecamatan</p>	
<p>Foto Pembinaan Administrasi Desa</p>		<p>Foto Pelatihan Kader PKK</p>	

b) Capaian Persentase BUMDes yang beroperasi dengan baik

Capaian Persentase BUMDes yang beroperasi dengan baik di Kecamatan Kalumpang pada Tahun 2023 target yang ditetapkan adalah sebesar 100% Capaian Persentase BUMDes yang beroperasi dengan baik dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini :

Gambar 3.2

Capaian Persentase BUMDes yang beroperasi dengan baik



Dari data diatas dapat dilihat bahwa Persentase BUMDes yang beroperasi dengan baik di Kecamatan Kalumpang sudah mencapai 100%. Sehingga capaian kinerja dapat dikatakan tercapai 100% atau memenuhi target yang telah ditetapkan.

Untuk Indikator Persentase BUMDes yang beroperasi dengan baik didukung dengan program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan jumlah anggaran Rp. 3.200.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 3.200.000,00 atau 100,00%

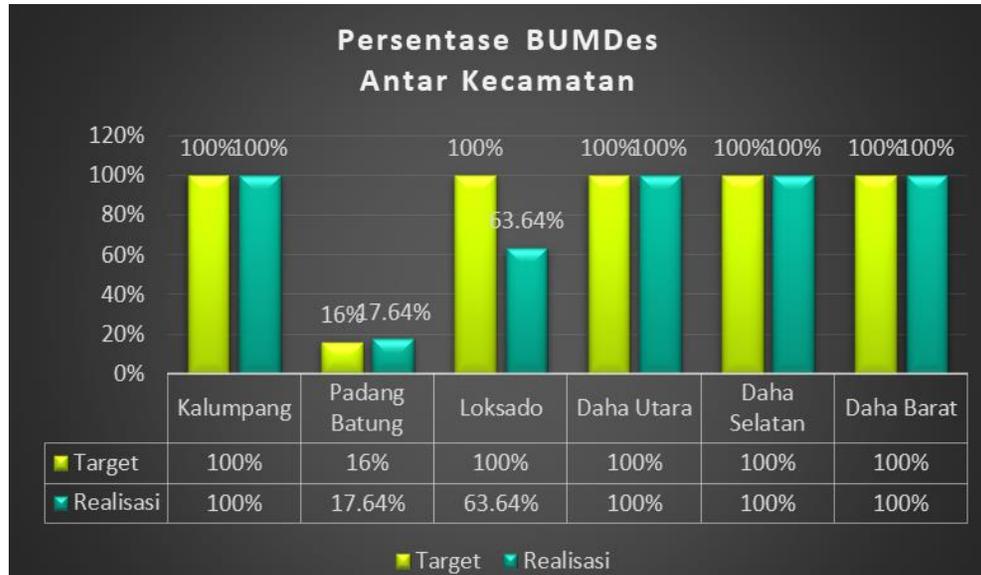
Tabel 3.10
Perbandingan Capaian Kinerja Kecamatan Kalumpang Tahun 2022 dan Tahun 2023

Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2022							Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2023						
No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan	No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	Meningkatnya BumDes Yang Beroperasi dengan baik	Persentase Bumdes yang beroperasi dengan Baik	100%	100%	100%	Capaian sdh tercapai	1	Meningkatnya BumDes Yang Beroperasi dengan baik	Persentase Bumdes yang beroperasi dengan Baik	100%	100%	100%	Capaian sdh tercapai

Tabel 3.11
Perbandingan Target Akhir Renstra Tahun 2023 dan Capaian Kinerja Kecamatan Kalumpang Tahun 2023

Target Akhir Renstra TA. 2023							Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2023						
No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan	No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	Meningkatnya BumDes Yang Beroperasi dengan baik	Persentase BUMDes yang beroperasi dengan baik	100%	100	100	Capaian sdh tercapai	1	Meningkatnya BumDes Yang Beroperasi dengan baik	Persentase Bumdes yang beroperasi dengan Baik	100%	100%	100%	Capaian sdh tercapai

Perbandingan sasaran Meningkatnya BumDes Yang Beroperasi dengan baik dengan Indikator Persentase BUMDes yang beroperasi dengan baik yaitu Perbandingan antara Kecamatan Kalumpang, Kecamatan Kalumpang, Padang Batung, Loksado, Daha Selatan dan Daha Barat dapat dilihat dalam grafik Gambar berikut ini:



Gambar 3.6

Keberhasilan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor baik internal maupun eksternal yaitu:

1. Ketepatan pelaksanaan kegiatan yang mengacu kepada dokumen perencanaan.
2. Terdapat konsistensi dalam implementasi program kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
3. Adanya komitmen yang kuat dari pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan di dalam merealisasikan setiap tahapan pelaksanaan DPA Tahun Anggaran 2023.

Dari faktor pendorong keberhasilan pencapaian kinerja organisasi Kecamatan Kalumpang di harapkan pencapaian target Indikator akan tercapai sesuai rencana.

Adapun Program yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian, Adapun capaian masing-masing program adalah sebagai berikut:

Tabel 3.12
Program Yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian

No	Program	Target Kinerja Program/kegiatan/sub kegiatan (Th 2023)	Realisasi Kinerja Program/kegiatan/sub kegiatan (Th 2023)	Capaian
1	2	3	5	6
1.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	100%
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	100%	100%

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa untuk program-program yang direncanakan sudah bisa dilaksanakan dengan baik dan dapat menunjang keberhasilan pencapaian kinerja.

Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian, Capaian masing-masing kegiatan dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 3.13
Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian

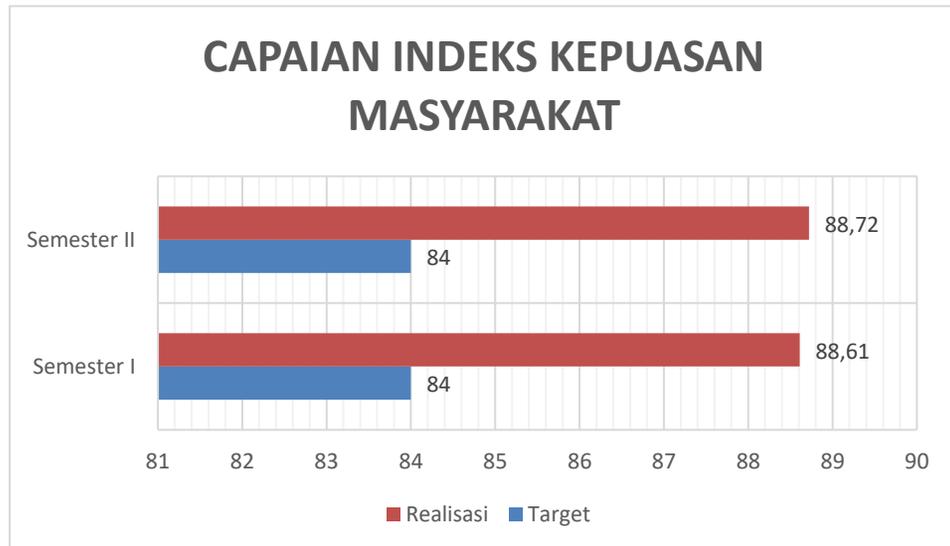
Kegiatan	Sub Kegiatan	Target Kinerja Program/kegiatan/sub kegiatan (tahun)	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Persentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan dengan baik	100%	100%	100%
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase Penyelenggaraan Tugas Perekonomian dan Pembangunan yang dilaksanakan dengan baik	100%	100%	100%



Foto Pembinaan BUMDES

c) **Capaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat**

Gambar 3.3



Capaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat

Capaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat, sampai dengan akhir tahun 2023 mencapai 88,72.

Pada Tahun 2023 penyelenggaraan urusan pemerintahan Umum dan Kewenangan Lainnya sebagaimana tugas dan fungsi kecamatan dapat dilaksanakan sepenuhnya. Sehingga capaian kinerja dapat dinyatakan tercapai 100% atau mencapai target. Adapun berbagai kegiatan yang mendukung tercapainya Indeks Kepuasan Masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp. 3.136.278.643,00 dan realisasi Rp. 2.380.181.371,00 atau 75,89%;
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan anggaran Rp. 14.584.750,00 dan realisasi Rp. 14.584.750,00 atau 100,00%;
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan anggaran Rp. 97.809.900,00 dan realisasi Rp. 95.352.900,00 atau 97,49%;
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan anggaran Rp. 69.800.000,00 dan realisasi Rp. 69.787.250,00 atau 99,98%;
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan anggaran Rp. 50.150.000,00 dan realisasi Rp. 47.140.000,00 atau 94,00%.

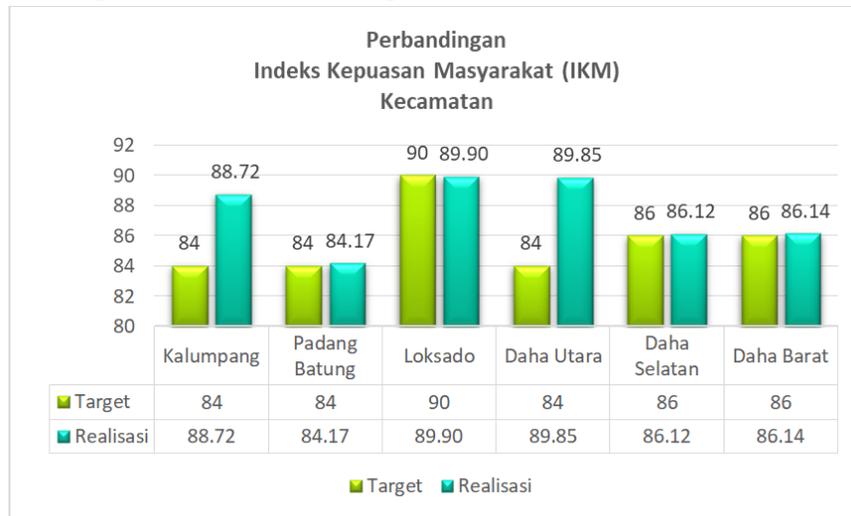
Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja Kecamatan Kalumpang Tahun 2022 dan Tahun 2023

Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2022							Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2023						
No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan	No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai 83	85,56	102	Capaian Indikator IKM tinggi dari target	3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai 84	88,72	106	Capaian Indikator IKM tinggi dari target

Tabel 3.4
Perbandingan Target Akhir Renstra Tahun 2023 dan Capaian Kinerja Kecamatan Kalumpang Tahun 2023

Target Akhir Renstra TA. 2023							Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2023						
No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan	No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	84	88,72	106	capaian Indikator IKM tinggi dari target	1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai 84	88,72	106	capaian Indikator IKM tinggi dari target

Perbandingan sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan dengan Indikator Indeks Kepuasan Pelayanan yaitu Perbandingan antara Kecamatan Kalumpang, Kecamatan Daha Utara, Padang Batung, Loksado, Daha Selatan dan Daha Barat dapat dilihat dalam grafik Gambar berikut ini:

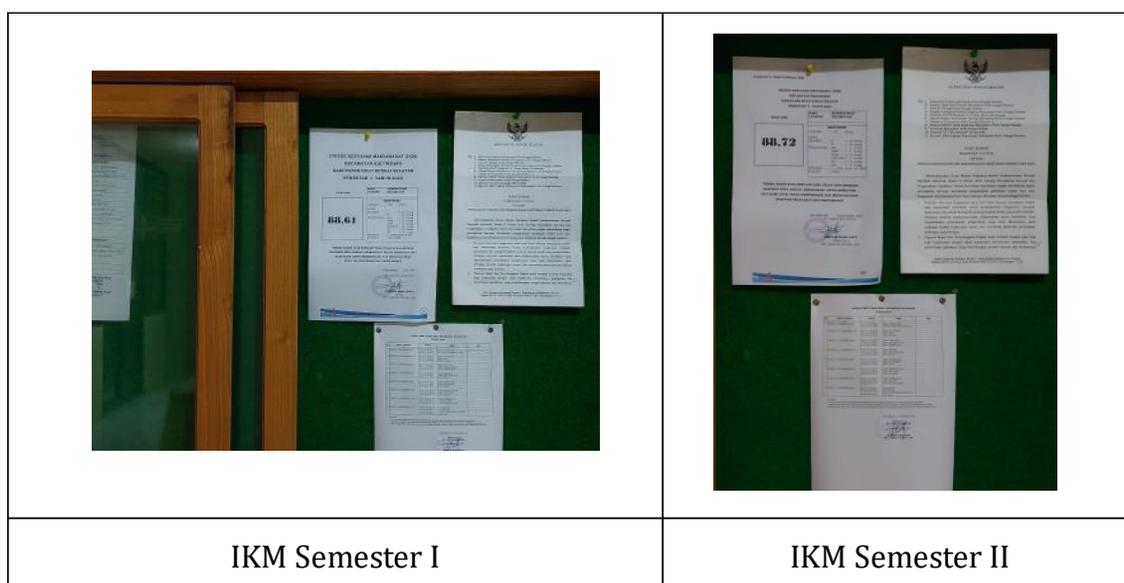


Gambar 3.8

Keberhasilan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor baik internal maupun eksternal yaitu:

1. Ketepatan pelaksanaan kegiatan yang mengacu kepada dokumen perencanaan.
2. Terdapat konsistensi dalam implementasi program kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
3. Adanya komitmen yang kuat dari pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan di dalam merealisasikan setiap tahapan pelaksanaan DPA Tahun Anggaran 2023.

Dari faktor pendorong keberhasilan pencapaian kinerja organisasi Kecamatan Kalumpang di harapkan pencapaian target Indikator akan tercapai sesuai rencana.



Dari data diatas dapat disampaikan capaian indikator Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan kewenangan lainnya pada dilaksanakan dengan baik dan dapat memenuhi target yang diinginkan yaitu mencapai 100%.

Untuk Tahun 2023 berdasarkan hasil evaluasi SAKIP oleh Evaluator KemenPANRB RI bahwa Indikator Hasil / Predikat AKIP sudah tidak menjadi IKU Kecamatan Kalumpang, namun tetap menjadi indikator sasaran RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sehingga untuk memenuhi target indikator tersebut Kecamatan Kalumpang berupaya mendukung capaian melalui pemenuhan dokumen AKIP yang harus dipenuhi oleh masing-masing perangkat daerah. Adapun dokumen yang telah disusun oleh Kecamatan Kalumpang adalah sebagai berikut :

1. Rencana Strategis Kecamatan Kalumpang Tahun 2018-2023;
2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2023;
3. Rencana Kerja Tahun Anggaran 2023;
4. Rencana Kerja Perubahan Tahun Anggaran 2023;
5. Indikator Kinerja Utama Tahun 2023;
6. Perjanjian Kinerja Tahun 2023;
7. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023;
8. Matrix Cascading Tahun 2023;
9. Laporan Kinerja Tahun 2023;

2. Hasil Penilaian Kinerja

Hasil penilaian kinerja untuk tahun 2023 terhadap indikator kinerja utama dapat kami sajikan sebagai berikut :

a. Indikator Kinerja 1 (Rasio Desa Maju Terhadap jumlah desa yang ada di kecamatan)

Pada indikator 1 yaitu Rasio Desa Maju Terhadap jumlah desa yang ada di kecamatan terdapat 7 (tujuh) desa di Kecamatan Kalumpang yakni Desa Bago Tanggul, Balanti, Balimau, Karang Bulan, Karang Paci, Sirih Hulu dan Tambingkar dengan status IDM sebagai desa maju.

Alasan pemilihan indikator ini adalah untuk lebih meningkatkan kinerja kecamatan dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pembangunan di desa

b. Indikator Kinerja 2 (Persentase BUMDes yang beroperasi dengan baik)

Pada indikator kinerja 2 yaitu Persentase BUMDes yang beroperasi dengan baik terdapat 1 (satu) BUMDes di Kecamatan Kalumpang yang beroperasi dengan baik serta memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa (PAD) yakni BUMDes Karang Bulan Jaya.

Alasan pemilihan indikator ini adalah untuk meningkatkan kinerja kecamatan dalam pembinaan BUMDes yang ada di kecamatan

c. Indikator Kinerja 3 (Indeks Kepuasan Masyarakat)

Pada indikator kinerja 3, yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat, pada akhir tahun 2023 mendapatkan nilai 88,72 dengan capaian 105,62% dari target yang telah ditetapkan.

Alasan pemilihan indikator ini adalah meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat

Banjarbaru, InfoPublik - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kalimantan Selatan (Kalsel) memacu pembangunan desa melalui Indeks Desa Membangun (IDM).

IDM mengklasifikasi desa dalam lima status, yaitu desa sangat tertinggal, tertinggal, berkembang, maju dan mandiri.

Kepala Dinas PMD Kalsel, Zulkifli mengapresiasi peningkatan status sejumlah desa menjadi desa mandiri.

“Peningkatan status desa ditunjang oleh beberapa faktor pendukung perubahan status desa seperti lokasi desa, potensi desa dan hubungan desa dengan desa lainnya,” kata Zulkifli, di Banjarbaru, Selasa (15/6/2023).

Disebutkan Zulkifli, terdapat 28 desa di sembilan kabupaten yang mengalami peningkatan status desa menjadi desa mandiri, yakni Tanah Bumbu 11 desa, Tanah Laut, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Selatan dan Kotabaru masing-masing tiga desa, Barito Kuala dua desa, Tapin, Hulu Sungai Utara dan Tabalong masing-masing satu desa.

Jumlah tersebut mengalami peningkatan dibanding tahun 2021, yang hanya mempunyai enam desa dengan status desa mandiri, yaitu Kotabaru sebanyak tiga desa, Tanah Laut sebanyak dua desa, dan Barito Kuala sebanyak satu desa.

Untuk Indikator kedua, Persentase Bumdes, diharapkan juga semakin tumbuh dan berkembang dengan baik sehingga mampu menjadi penguat perekonomian di desa. Hal ini sangat di apresiasi oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, seperti dalam kutipan wacana berikut :

“Sebanyak 22 orang pengurus Bumdes dan 11 orang perwakilan dari masing-masing kecamatan, hari ini mengikuti kegiatan Pendampingan Penerapan Aplikasi atau Asistensi Implementasi Aplikasi untuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalsel yang bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS). Acara ini dilaksanakan selama sehari bertempat di Pendopo Bupati, Kandungan, yang langsung dibuka oleh Bupati HSS, Drs. H. Achmad Fikry, MAP. (Selasa, 25/05).



Dan untuk indikator yang ketiga, Indeks Kepuasan Masyarakat, juga semakin meningkat setiap tahunnya. Hal ini dibuktikan dengan kutipan wacana berikut :

Kandangan, kalselpos.com - Ombudsman Kalsel mengunjungi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Hulu Sungai Selatan, Rabu (3/3). Kunjungan Ombudsman Kalsel tersebut diterima langsung oleh Bupati Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Achmad Fikry, bersama jajarannya, di Aula Rakat Mufakat setda.

Kepala Ombudsman Kalsel Hadi Rahman, mengatakan kunjungan untuk memperkuat sinergitas dan memperkuat hubungan kelembagaan sesuai dengan konteks laporan masyarakat serta berbagai kajian guna mengedepankan pencegahan.

Menurutnya, pelayanan publik di Kabupaten Hulu Sungai Selatan punya catatan prestasi yang baik, sehingga peningkatan kapasitas aparatur sipil negara (ASN) perlu diperhatikan. "Begitu juga kepada masyarakat umum pelayanan transportasi, sandang, pangan sampai listrik diperhatikan," ujarnya.

Pihaknya meminta Pemkab Hulu Sungai Selatan yang sudah memiliki standar pelayanan, supaya tetap dipertahankan dan segala aduan masyarakat dilayani.

"Terus lakukan diperbaiki bersama, sehingga ke depan lebih baik dan mal administrasi makin berkurang," katanya.

Sementara itu, Bupati Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Achmad Fikry, mengatakan pihaknya terus memberikan pelayanan terbaik dan sudah menjadi tekad dirinya sejak terpilih menjadi Bupati Kabupaten Hulu Sungai Selatan. "Alhamdulillah dari tahun ketahun indeks kepuasan masyarakat kita cukup bagus," ujarnya.

Menurut Bupati, dari 2017 sekitar 81,13 dengan kriteria baik, dan tahun 2020 sudah mencapai angka 86,63 indeks kepuasan masyarakat.

Mulai 2023 ini Mal Pelayanan Publik (MPP) di Bumi Antaludin dibangun dan diharapkan dapat sudah beroperasi dalam melakukan pelayanan publik lebih baik lagi kepada masyarakat.

"Semoga ini menjadi langkah awal kita untuk mempererat hubungan antara Pemkab dengan Ombudsman Kalsel. Karena tujuan kita sama, bagaimana terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," harapannya.



3. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rumus perhitungan adalah :

$$\frac{\% \text{ Capaian Kinerja}}{\% \text{ Realiasi Anggaran}} = \frac{100,00\%}{95,52\%} = 1.05\%$$

Capaian kinerja 100,00% berbanding dengan realisasi anggaran 95,52% hasilnya 1,05% (sangat efisien). Berikut tabel perhitungan efisiensi anggaran :

No.	Indikator Kinerja Sasaran	efisiensi kinerja sasaran			Indikator Kinerja Program	efisiensi kinerja program			Indikator Kinerja Kegiatan	efisiensi kinerja kegiatan			Indikator Kinerja Sub Kegiatan	efisiensi kinerja sub kegiatan		
		capaian kinerja sasaran	realisasi anggaran	efisiensi		capaian kinerja program	realisasi anggaran	efisiensi		capaian kinerja kegiatan	realisasi anggaran	efisiensi		capaian kinerja sub kegiatan	realisasi anggaran	efisiensi
1	Rasio Desa Maju Terhadap jumlah desa yang ada di kecamatan	100%	99,91%	1,00	Persentase Penyelenggaraan Tugas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan dengan baik	100%	99,91%	1,00	Meningkatnya nilai indeks desa membangun	100%	99,91%	1,00	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	100%	100%	1,00
													Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	100%	99,72%	1,00
													Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	100%	100%	1,00
2	Persentase BUMDes yang beroperasi dengan baik	100%	100%	1,00	Persentase Penyelenggaraan Tugas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan dengan baik	100%	100%	1,00	Persentase BUMDes yang dibina dengan baik	100%	100%	1,00	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	100%	100%	1,00

3	Indeks Kepuasan Masyarakat	100%	94,90%	1,05	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya dilaksanakan dengan baik	100%	100%	1,00	Persentase objek pelayanan yang diselesaikan tepat waktu	100%	99%	1,0	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100%	100%	1,00
4					Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan dengan baik	100%	92,31%	1,08	Tingkat kesesuaian prioritas pembangunan kecamatan terhadap prioritas pembangunan daerah	100%	81%	1,2	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	100%	100%	1,00
5									Persentase Usaha Mikro yang memiliki izin usaha	100%	96%	1,0	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	100%	99,81%	1,00
6									Persentase PMKS yang terlindungi	100%	90%	1,1	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100%	77,11%	1,30
7					Persentase penyelenggaraan urusan Keterlibatan dan Ketertarikan Umum yang dilaksanakan dengan baik	100%	83,61%	1,20	Laporan kamtibmas yang disampaikan	100%	99%	1,0	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	100%	83,61%	1,20
8					Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dengan baik	100%	100%	1,00	Laporan kamtibmas yang disampaikan	100%	76%	1,3	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	100%	100%	1,00
9										100%	100%	1,0	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	100%	100%	1,00
10					Persentase Kegiatan Perencanaan dan Umum yang Dilaksanakan	100%	98,56%	1,01	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Kecamatan yang berkualitas	100%	100%	1,0	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%	100%	1,00
11													Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	1,00
12													Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100%	95,63%	1,05
13													Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100%	100%	1,00
14													Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	100%	100%	1,00
15													Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	100%	100%	1,00
16									Persentase pelayanan administrasi umum sesuai kebutuhan	100%	98,38%	1,02	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100%	100%	1,00
17													Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100%	99,97%	1,00
18													Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100%	90,51%	1,10
19													Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100%	99,82%	1,00
20													Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	100%	100%	1,00
21													Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	100%	1,00
22									Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai kebutuhan	100%	96,76%	1,03	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100%	90,60%	1,10
23													Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100%	99,69%	1,00
24													Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor sesuai kebutuhan	100%	100%	1,00
25									Persentase pelayanan administrasi umum sesuai kebutuhan	100%	98,77%	1,01	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100%	95,09%	1,05
26													Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100%	100%	1,00
27													Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100%	100%	1,00
28													Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100%	100%	1,00
				1,02				1,04				1,06				1,03

8. Rekomendasi Inspektorat Terhadap Reviu Laporan Kinerja Kecamatan Kalumpang TA. 2022

Laporan Kinerja menampilkan capaian indikator dan realisasi keuangan yang sesuai serta memperlihatkan perbandingan capaian dengan instansi lain (kecamatan lain) serta perbandingan dengan target akhir renstra.

9. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan Untuk Mencapai Target

a) Penyebab Keberhasilan:

- 1) Adanya komitmen dari semua pejabat struktural Kantor Kecamatan Kalumpang;
- 2) Mengoptimalkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada;
- 3) Mengoptimalkan Sarana Prasarana yang tersedia;

b) Penyebab Kegagalan:

- 1) Ketersediaan SDM Kantor Kecamatan Kalumpang secara kuantitas dan kualitas masih kurang memadai, karena ada yang pensiun, mutasi promosi, serta adanya SDM yang tidak sesuai kompetensinya;
- 2) Sarana pendukung peningkatan pelayanan berupa hardware sebagian sudah out of date.

c) Alternatif solusi yang telah dilakukan:

Langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi kendala dan hambatan adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kualitas SDM dengan bimtek dan diikuti diklat
- 2) Mengusulkan penambahan sarana pendukung untuk peningkatan pelayanan yang lebih maksimal, dan melakukan pemeliharaan sarana yang ada.

B. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

a) Program yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian, Adapun capaian masing-masing program adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5**Program Yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian**

No	Program	Target Kinerja Program/kegiatan/sub kegiatan (Th 2023)	Realisasi Kinerja Program/kegiatan/sub kegiatan (Th 2023)	Capaian
1	2	3	5	6
1.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	100%
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	100%	100%
3.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	100%
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	100%
5.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	100%	100%
6.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	12 Bulan	12 Bulan	100%

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa untuk program-program yang direncanakan sudah bisa dilaksanakan dengan baik dan dapat menunjang keberhasilan pencapaian kinerja.

- b) Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian, Capaian masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6**Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja Tahun 2023**

(Tambah Tabel Indikator Prog)

Kegiatan	Sub Kegiatan	Target Kinerja Program/kegiatan/sub kegiatan (tahun)	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Persentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan dengan baik	100%	100%	100%
	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Persentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan dengan baik	100%	100%	100%

Kegiatan	Sub Kegiatan	Target Kinerja Program/kegiatan/sub kegiatan (tahun)	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Persentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan dengan baik	100%	100%	100%
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase Penyelenggaraan Tugas Perekonomian dan Pembangunan yang dilaksanakan dengan baik	100%	100%	100%
	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Tugas Kesejahteraan Sosial dilaksanakan dengan baik	100%	100%	100%
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Tugas Kesejahteraan Sosial dilaksanakan dengan baik	100%	100%	100%
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Persentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan dengan baik	100%	100%	100%
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan dengan baik	100%	100%	100%
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Tugas Ketertiban Umum yang dilaksanakan dengan baik	100%	100%	100%
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang dilaksanakan dengan baik	100%	100%	100%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pelayanan administrasi sesuai standar	12 Bulan	12 Bulan	100%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pelayanan administrasi sesuai standar	12 Bulan	12 Bulan	100%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pelayanan administrasi sesuai standar	12 Bulan	12 Bulan	100%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pelayanan administrasi sesuai standar	12 Bulan	12 Bulan	100%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pelayanan administrasi sesuai standar	12 Bulan	12 Bulan	100%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pelayanan administrasi sesuai standar	12 Bulan	12 Bulan	100%

Kegiatan	Sub Kegiatan	Target Kinerja Program/kegiatan/sub kegiatan (tahun)	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pelayanan administrasi sesuai standar	12 Bulan	12 Bulan	100%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pelayanan administrasi sesuai standar	12 Bulan	12 Bulan	100%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pelayanan administrasi sesuai standar	12 Bulan	12 Bulan	100%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pelayanan administrasi sesuai standar	12 Bulan	12 Bulan	100%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pelayanan administrasi sesuai standar	12 Bulan	12 Bulan	100%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen AKIP yang memenuhi aspek kualitas	15 Dok	15 Dok	100%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen AKIP yang memenuhi aspek kualitas	15 Dok	15 Dok	100%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dokumen Keuangan yang memenuhi aspek kualitas	12 Bulan	12 Bulan	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen Keuangan yang memenuhi aspek kualitas	1 Dok	1 Dok	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dokumen Keuangan yang memenuhi aspek kualitas	12 Dok	12 Dok	100%
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen Keuangan yang memenuhi aspek kualitas	1 Dok	1 Dok	100%

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa untuk kegiatan-kegiatan yang direncanakan sudah bisa dilaksanakan dengan baik dan dapat menunjang keberhasilan pencapaian kinerja.

Keberhasilan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor baik internal maupun eksternal yaitu:

- 1) Ketepatan pelaksanaan kegiatan yang mengacu kepada dokumen perencanaan.
- 2) Terdapat konsistensi dalam implementasi program kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
- 3) Adanya komitmen yang kuat dari pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan di dalam merealisasikan setiap tahapan pelaksanaan DPA Tahun Anggaran 2023.

Selain dari faktor pendorong keberhasilan masih terdapat kekurangan di dalam pencapaian kinerja organisasi Kecamatan Kalumpang sehingga masih ada indikator yang tidak mencapai target. Faktor utama penyebab dari kegagalan tersebut adalah terjadinya beberapa regulasi yang berubah secara mendasar karena kebijakan dari Pemerintah Daerah sehingga sedikit banyak berpengaruh terhadap upaya pencapaian kinerja.

C. Hasil Dokumentasi Kegiatan Utama Yang Dilaksanakan



Kegiatan Tausiyah di Kantor Kecamatan Kalumpang Tahun 2023



Kegiatan Tausiyah Bersama Anak Yatim di Kantor Kecamatan Kalumpang



Kegiatan Sunatan Massal



Pentas Kreativitas Seni dalam Rangka HUT RI ke-78



Kegiatan Inovasi Gotong Royong "Peduli Lansia" oleh TP.PKK Kecamatan Kalumpang

B. Realisasi Anggaran

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai, Kantor Kecamatan Kalumpang melaksanakan program dan kegiatan yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor Kecamatan Kalumpang Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2023 dengan jumlah target anggaran Rp. 3.397.085.593,00 dan untuk capaian realisasi Tahun 2023 adalah Rp. 2.635.415.421,00 atau 77,58% dari target realisasi anggaran. Realisasi anggaran Kecamatan Kalumpang secara rinci dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.7

Realisasi Anggaran Tahun 2023 Kantor Kecamatan Kalumpang

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target Kinerja Program/kegiatan/ sub kegiatan	Anggaran Sub Kegiatan		
					anggaran	realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	100%	8.062.300	7.969.650	99,85
			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	100%	11.700.000	11.700.000	100,00
			Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	100%	5.500.000	5.500.000	100,00
			Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	100%	3.200.000	3.200.000	100,00
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Masyarakat Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	100%	17.562.450	17.562.450	100,00
			Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	100%	47.359.450	47.330.750	99,94
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100%	32.888.000	30.459.700	92,62
3.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	100%	46.150.000	43.140.000	93,48
			Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	100%	4.000.000	4.000.000	100,00
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	100%	69.800.000	69.787.250	99,98
5.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	100%	14.584.750	14.584.750	100,00
6.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	3.500.100	3.498.100	99,94

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target Kinerja Program/kegiatan/sub kegiatan	Anggaran Sub Kegiatan				
					anggaran	realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
	Daerah Kabupaten/Kota		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	40.054.550	39.939.550	99,71		
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	88.075.000	88.040.250	99,96		
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Bulan	12.351.500	12.060.950	97,65		
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Bulan	1.500.000	1.500.000	100,00		
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	195.000.000	163.213.591	83,70		
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Unit	38.900.000	34.451.000	88,56		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0	0	0	0		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	51.775.105	46.410.731	89,64		
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	85.482.000	76.960.600	90,03		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 Bulan	29.005.000	27.455.000	94,66		
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 Bulan	15.000.000	14.992.500	99,95		
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12 Bulan	11.575.000	11.335.000	97,93		
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12 Bulan	59.901.293	59.247.539	98,91		
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dok	8.000.000	7.732.250	96,65		
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11 Dok	1.500.000	1.500.000	100,00		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	2.489.659.095	1.786.844.560	71,77		
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dok	2.000.000	2.000.000	100,00		
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Dok	1.500.000	1.499.750	99,98		
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dok	1.500.000	1.500.000	100,00		
		J U M L A H					3.397.085.593	2.635.415.421	77,58

Dari anggaran yang tersedia sebesar Rp. 3.397.085.593,00 tercapai realisasi sebesar Rp. 2.635.415.421,00

C. Prestasi Yang Dicapai

Pada Tahun 2023 prestasi yang berhasil diraih Kecamatan Kalumpang adalah sebagai berikut :

NO	PRESTASI	TINGKAT	DOKUMENTASI
1	JUARA 1 LOMBA PENGUKURAN DAN PENIMBANGAN TB/BB DALAM RANGKA JAMBORE KADER POSYANDU DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	
2	JUARA TERBAIK 2 LOMBA POSYANDU KASIH IBU DESA BALIMAU DALAM LOMBA POSYANDU DAN KADER TINGKAT KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN	KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN	
3	JUARA 1 LOMBA KADER PKK	KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN	
4	JUARA 2 LOMBA PAUD DI DESA KARANG PACI	KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN	

5	JUARA 2 LOMBA LINGKUNGAN BERSIH DAN SEHAT (LBS)	KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN	
6	JUARA 3 LOMBA HIASAN MEJA DALAM LOMBA MASAK B2SA DAN MASAKAN SERBA IKAN	KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN	
7	JUARA I YEL-YEL 10 PROGRAM POKOK PKK DENGAN TEMA CEGAH STUNTING ITU PENTING DALAM RANGKA JAMBORE KADER PKK DI BANJARBARU	KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN	
8	JUARA I PENYULUHAN PKK YANG DILAKSANAKAN DALAM GIAT "RANGKING 1" DALAM RANGKA JAMBORE KADER PKK DI BANJARBARU	KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN	

NO	PRESTASI	TINGKAT	DOKUMENTASI
9	JUARA 1 LOMBA CERDAS CERMAT DALAM RANGKA JAMBORE KADER POSYANDU DI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN	KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN	
10	JUARA II LOMBA MENGISI KMS DALAM RANGKA JAMBORE KADER POSYANDU DI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN	KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN	
11	JUARA 1 LOMBA PENGUKURAN DAN PENIMBANGAN TB/BB DALAM RANGKA JAMBORE KADER POSYANDU DI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN	KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN	
12	JUARA III LOMBA PENYULUHAN KESEHATAN DALAM RANGKA JAMBORE KADER POSYANDU DI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN	KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN	

NO	PRESTASI	TINGKAT	DOKUMENTASI
13	<p>JUARA I LOMBA FASHION SHOW TP. KETUA PENGGERAK PKK KECAMATAN KALUMPANG MERAH JUARA I DALAM RANGKA MEMERIAHKAN HARI JADI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN YANG KE-73</p>	<p>KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN</p>	
14	<p>KETUA TP. PKK KECAMATAN KALUMPANG DALAM HAL INI SEBAGAI KETUA DHARMA WANITA PERSATUAN UNIT KECAMATAN KALUMPANG MERAH JUARA 1 FASHION SHOW TK. KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN DALAM RANGKA MEMPERINGATI HARI IBU YANG KE-95</p>	<p>KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN</p>	

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan data capaian indikator kinerja utama Kecamatan Kalumpang Kabupaten Hulu Sungai Selatan, maka pada Tahun 2023 semua indikator kinerja utama dapat direalisasikan dan semua kegiatan dapat dilaksanakan. Adapun realisasi capaian per indikator kinerja utama adalah : **“Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi”**

1. Indikator Rasio Desa Maju Terhadap jumlah desa yang ada di kecamatan, keadaan sampai akhir tahun yakni 7 (tujuh) desa dengan status maju dari 9 (sembilan) desa yang ada dikecamatan atau 7 : 9.
2. Indikator Persentase BUMDes yang beroperasi dengan baik, terdapat 1 (satu) BUMDes yang beroperasi dengan baik dan memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli desa.
3. Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Kalumpang sampai dengan semester II Tahun 2023 mendapatkan nilai 88,72, lebih besar dari target yang ditetapkan sebesar 84.

Demikian Laporan Kinerja Kecamatan Kalumpang Tahun Anggaran 2023 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas apa yang telah dilaksanakan. Semoga apa yang tersaji dapat memberikan masukan untuk peningkatan kinerja Kecamatan Kalumpang di tahun-tahun yang akan datang.

Kalumpang, 31 Desember 2023

Pt. CAMAT KALUMPANG



WAHYUDI NOOR, S.STP

Penata

NIP. 19900107 201206 1 001